

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting karena merupakan representasi kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengecoh *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja atau kondisi perusahaan. Intervensi dan mengecoh merupakan istilah yang dipakai sebagai dasar dari sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara beberapa orang lain yang memandang kegiatan manajemen laba ini tidak sebagai tindakan penipuan. Hal tersebut disebabkan karena intervensi tersebut dilakukan oleh manajer Perusahaan sesuai dengan kerangka standar akuntansi yang menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diakui secara umum (H. Sri Sulistyanto, n.d.).

Pemakai laporan keuangan memiliki keterbatasan dalam menginterpretasikan laporan keuangan yang bertujuan untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba. Kriteria penyajian laporan keuangan merupakan kriteria pertama dalam mengidentifikasi kebijakan manajerial dalam fleksibilitasnya menghitung laba. Akuntansi memberikan peluang bagi manajer untuk mencatat faktadengan cara tertentu dan mengestimasi secara subyektif. Kedua, tidak ada observasi yang sempurna terhadap kebijakan manajerial, mengingat tidak semua kebijakan manajerial dapat diobservasi oleh pemakai laporan keuangan, bahkan jika kebijakan itu diungkapkan dalam laporan keuangan sekalipun.

Praktik manajemen laba seringkali terkait dengan munculnya kesalahan dan kelalaian dari pihak manajemen keuangan sendiri. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen labamerupakan suatu kondisi dimanamanajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, 1998) (Mas et al., 2017).

Pada era globalisasi saat ini, perusahaan menghadapi persaingan bisnis yang sengit. Mereka harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam menghasilkan produk berkualitas, seiring dengan pengelolaan keuangan yang efisien. Salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan adalah informasi mengenai laba yang tercatat dalam laporan keuangan. Laba sering digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan seperti pemberian kompensasi, pembagian bonus kepada manajer, menilai kinerja manajemen, dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Laporan keuangan merupakan bagian penting bagi perusahaan, yaitu sebagai sarana komunikasi antara pihak internal dan eksternal. Tujuan utama dari pelaporan keuangan tahunan perusahaan adalah untuk digunakan oleh pihak pemangku kepentingan. Sedangkan, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 (2020:3) menyatakan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Manajemen kerap menjadikan informasi laba sebagai target untuk memaksimalkan kepuasaannya atas suatu kebijakan tertentu sehingga untuk tujuan tertentu angka laba dapat naik atau diturunkan atau tindakan tersebut dapat kita kenal sebagai praktik manajemen laba (Achyani & Lestari, 2019).

Menurut PSAK No. 01 ketepatan waktu adalah penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang disediakan haruslah tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama bagi investor dan kreditor. Jika terdapat keterlambatan dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan kemampuan pengaruh terhadap keputusan.

Penyajian yang wajar dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup pengungkapan yang jujur mengenai dampak dari transaksi, serta menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan SAK (Hilda Diana Safitri, 2019).

Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman laporan keuangan ini melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dijelaskan dengan tegas bahwa Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Semakin perusahaan menunda mempublikasikan laporan keuangannya, maka akan menimbulkan informasi -informasi yang menyimpang sehingga dapat mempengaruhi kinerja pasar atau bursa yang otomatis merugikan publik karena menerima informasi -informasi yang tidak relevan dan tidak handal (Waktu et al., 2020).

Menurut para manajemen, pelaporan keuangan merupakan sarana akuntansi kepada pihak eksternal atas penyertaan investasinya pada perusahaan (Achyani, dkk, 2015). Di antara berbagai jenis laporan keuangan yang ada, hasilnya adalah laporan keuangan yang sering diperhatikan oleh para penggunanya. Laporan laba rugi menyajikan informasi terkait ukuran kinerja perusahaan yang disajikan sebagai laba atau rugi. Laba mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Keuntungan terkait dengan pembagian dividen kepada pemilik perusahaan. Oleh karena itu, manajemen berusaha mencapai target keuntungannya untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka lakukan. Manajemen laba menggambarkan bahwa manajemen diduga memanipulasi data keuangan perusahaan untuk motif tertentu (Inawati1 et al., 2021).

Praktik manajemen sendiri dipicu oleh kondisi usaha yang buruk atau adanya insentif untuk menarik investor. Selain menarik investor, motivasi lainnya adalah insentif pajak. Insentif pajak menciptakan kecenderungan bagi manajer untuk mengurangi laba. Untuk mewujudkan insentif pajak tersebut, perusahaan akan melakukan langkah- langkah perencanaan pajak. Perencanaan

pajak seringkali dilakukan oleh dunia usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang kepada pemerintah. Manajemen mempunyai hak dan keleluasaan untuk memaksimalkan keuntungan bisnis, yang mengarah pada proses memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemilik bisnis (Pajak et al., 2021).

Manajemen laba pada suatu perusahaan dalam hal ini menghadapi suatu tekanan yang berbeda pada saat melakukan praktik manajemen laba, inilah keadaan yang sebenarnya terjadi. Di sisi manajemen perusahaan berusaha untuk menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang akan dilaporkan pada pemegang saham dan pengguna laporan keuangan eksternal lainnya. Namun disisi lain manajemen perusahaan ingin meminimalkan laba kena pajak yang akan dilaporkan untuk keperluan pajak. Kemudian manajemen perusahaan mengambil langkah agar kedua tujuan tersebut dapat tercapai yaitu dengan memanipulasi laba lebih tinggi dalam pelaporan keuangan namun tidak untuk pelaporan pajaknya (Budiantoro et al., 2022).

Di Indonesia contoh kasus mengenai praktik manajemen laba terjadi pada PT.Garuda Indonesia Tbk. Kinerja Garuda Indonesia yang berhasil mencatatkan *net income* sebesar US\$809 ribu pada tahun 2018, berkebalikan dengan laba bersih tahun 2017 yang tercatat rugi sebesar US\$216,58 juta. Hal ini tentu menjadi polemik ditengah masyarakat. Pencatatan laba ini cukup mengejutkan lantaran hingga September 2018 saja laba Garuda masih tercatat rugi sebesar US\$114,08 juta. Chairul Tanjung dan Dony Askaria, yang menjabat sebagai komisaris Garuda, menolak untuk menandatangani laporan keuangan Garuda pada tahun 2018. Penolakan tersebut terjadi karena adanya ketidakjelasan terkait kesepakatan kerjasama layanan wifi/konektivitas antara Garuda dan PT. Mahata Aero Teknologi. Transaksi kerjasama yang diduga belum menerima pembayaran diakui oleh Garuda sebagai pendapatan. Kedua komisaris tersebut mewakili PT. Trans Airways, sebuah pemegang saham Garuda dengan kepemilikan sebesar 25,61%. (Sumber: cnnindonesia.com, diakses pada 10 Agustus 2019) (Bhakti Utami & Ary Kartikasari, 2020).

Komisaris Garuda Chairul Tanjung dan Dony Askaria lebih lanjut menyatakan bahwa nilai transaksi dengan Mahata, yang mencapai US\$239,94 juta, dianggap terlalu besar dan memiliki dampak signifikan pada pencatatan laporan keuangan. Pencatatan transaksi dengan Mahata tersebut juga berdampak pada posisi neraca keuangan Garuda. Jika nilai transaksi kerjasama tersebut tidak diakui sebagai pendapatan, Garuda sebenarnya mengalami kerugian sebesar US\$244,960 juta. Kedua komisaris tersebut berpendapat bahwa pencatatan transaksi tersebut menyebabkan kebingungan, karena menciptakan peningkatan besar pada pos beban yang harus ditanggung oleh Garuda. Selain itu, pembayaran PPN dan PPh yang harus dilakukan oleh Garuda juga terdampak dan menjadi lebih besar. Padahal, beban pajak tersebut seharusnya belum wajib dibayar Garuda karena transaksi kerjasama dengan Mahara belum masuk ke keuangan Garuda. (cnnindonesia.com, diakses pada 10 Agustus 2019).

Laporan Keuangan publik kemudian merespon polemik laporan keuangan Garuda tersebut. Sehari setelah informasi mengenai penolakan penandatanganan laporan keuangan oleh komisaris Garuda menyebar, nilai saham GIAA mengalami penurunan dan mencapai level Rp. 478 per lembar saham, atau turun sebesar 4,4% dari sebelumnya di angka Rp. 500 per lembar saham. Hingga akhir hari di penutupan perdagangan saham, nilai saham Garuda terus merosot tajam sebesar 6,8% di angka Rp. 466 per lembar saham. Pada akhirnya, pada tanggal 28 Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan teguran terkait kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. OJK melakukan pemeriksaan terhadap kontroversi penyajian laporan keuangan tahunan Garuda. OJK memberikan sanksi, termasuk perintah tertulis kepada Garuda untuk memperbaiki dan menyajikan ulang laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Selain itu, OJK juga menetapkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100 juta terkait penyajian laporan keuangan tahunan, memberikan denda serupa kepada seluruh anggota direksi Garuda, dan mengenakan pembekuan selama satu tahun terhadap Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan tahunan Garuda. (Sumber: www.cnnindonesia.com, diakses pada 10 Agustus 2019).

Garuda Indonesia segera merespons dengan melakukan *restatement* dan perbaikan atas *financial statement* Garuda per tanggal buku 31 Desember 2018, sesuai dengan permintaan OJK. Jika sebelum dilakukan *re-statement*, Garuda Indonesia mencatat laba tahun berjalan pada 2018 sebesar US\$ 5 juta, hasil dari *restatement* laporan keuangan, perusahaan membukukan rugi tahun berjalan sebesar US\$ 1750 juta atau setara Rp 2,40 triliun pada tahun 2018 (cnbcindonesia.com, diakses pada 10 Agustus 2019).

Good corporate sangat diperlukan untuk diterapkan suatu perusahaan dalam melakukan pencegahan terhadap praktik manajemen laba. Adanya *good corporate governance* dapat menolok para stakeholder untuk lebih percaya bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan terbebas dari indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian ini mekanisme *good corporate governance* menggunakan komponen komisaris independen. Komisaris independen memiliki pengawasan yang baik kepada manajemen, sehingga dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang dijalankan oleh manajemen, artinya apabila dewan komisaris semakin kompeten maka dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan (Yola Fionita & Halkadri Fitra, 2021).

Pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dengan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata untuk kepentingan perseroan. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal (Badriyah Rifai, 2009).

Praktik manajemen laba sendiri dipicu oleh adanya kondisi usaha yang buruk atau adanya insentif untuk menarik investor. Selain menarik investor, motivasi lainnya adalah insentif pajak. Insentif pajak menciptakan kecenderungan bagi manajer untuk mengurangi laba. Untuk mewujudkan insentif pajak tersebut, perusahaan akan melakukan langkah-langkah perencanaan pajak. Perencanaan pajak seringkali dilakukan oleh dunia usaha

untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang kepada pemerintah. Manajemen mempunyai hak dan keleluasaan untuk memaksimalkan keuntungan bisnis, yang mengarah pada proses memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemilik bisnis.

Ada berbagai alasan mengapa manajer perusahaan memilih untuk melaporkan laba yang lebih rendah. salah satu diantaranya adalah mengurangi *political cost*. Perusahaan berskala besar cenderung responsif terhadap biaya politik, seperti pajak, sehingga mereka cenderung mengurangi angka laba bersih dalam laporan keuangannya. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi kecil atau besarnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan total aset, pendapatan penjualan, dan kapitalisasi pasar. maka dari itu, semakin besar ukuran dari perusahaan tersebut. Total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut (Moh. Rifki Hidayatullah, 2023).

Pajak dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam konteks akuntansi pajak penghasilan, perbedaan tersebut menghasilkan dua jenis yaitu beda waktu dan beda tetap. Perbedaan waktu akan menghasilkan pajak tangguhan (*deffered tax*). Pajak tangguhan adalah efek yang terjadi akibat perbedaan pajak penghasilan terutang dengan beban pajak yang dimaksud sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam keuangan komersial (Dicky Iskandar, 2019).

Pajak memiliki dua perspektif yang berbeda dari perspektif perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sementara dari perspektif pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pembangunan. Dalam konteks akuntansi pajak penghasilan, perbedaan ini menghasilkan dua jenis pajak, yaitu pajak tangguhan beda waktu dan pajak tangguhan beda tetap. Pajak tangguhan beda waktu terjadi karena

perbedaan antara pajak penghasilan terutang dan beban pajak yang sebenarnya, yang terjadikarena perbedaan temporer. Pajak tangguhan ini harus dicatat dan tercermin dalam laporan keuangan komersial. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang akan dipulihkan di masa mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Waluyo, 2019). Di sisi lain, beban pajak tangguhan adalah kewajiban yang timbul ketika perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang mengakibatkan beban pajak sesuai dengan hukum pajak. Selain perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan, diduga mempengaruhi manajemen laba, termasuk ukuran perusahaan (Purwaningsih & Sarifani, 2023).

Perencanaan pajak didefinisikan sebagai suatu proses pembauran usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk menggunakan fasilitas perpajakan yang digunakan untuk meminimalkan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dengan cara memanfaatkan fasilitas perpajakan, penghematan pajak, dan penghindaran pajak sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan. Faktor perencanaan pajak bukan satu- satunya yang memengaruhi praktik manajemen laba; beban pajak tangguhan juga mendorong perusahaan untuk mengurangi atau menunda pembayaran total pajak mereka. Mengurangi biaya politik sering dikaitkan dengan motivasi perpajakan. Salah satu biaya politik adalah pajak. Praktik manajemen laba bergantung pada besar atau kecilnya perusahaan. Berbagai faktor internal dan eksternal secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi manajemen keuangan, menyebabkan kesalahan dan kelalaian yang sering terjadi dalam kaitannya dengan manajemen laba (Nova Dinda Arini, 2019).

Beberapa komponen yang memengaruhi operasi manajemen laba termasuk perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, kepemilikan manajemen, dan arus kas bebas. Secara teoritis, manajemen yang memiliki banyak saham akan bertindak seperti memiliki kepentingan dalam perusahaan. Teori berbasis kontrak, atau teori yang mengarah pada kontrak, menyatakan bahwa manajemen akan melakukan pilihan yang tepat untuk

metode akuntansi yang akan menambah nilai bagi perusahaan (Christie dan Zimmerman, 1994).

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi. Dengan kata lain, beban pajak tangguhan ini timbul dari proses koreksi fiskal, dimana terjadi koreksi negatif, yaitu nilai penghasilan berdasarkan pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih kecil dari nilai berdasarkan pajak (Ahmad Fauzan, 2021).

Menurut PSAK 46 mencatat bahwa manajemen memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi untuk menilai besaran cadangan beban atau pendapatan pajak tangguhan berdasarkan perbedaan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Manajemen memerlukan penilaian dan estimasi tertentu, memberikan fleksibilitas yang lebih besar pada manajemen (Sri Setia Ningsih, 2020). PSAK 46 menggambarkan laba akuntansi sebagai laba-rugi tanpa memperhitungkan beban pajak. Beban pajak tangguhan dicatat dalam laporan laba-rugi, sementara liabilitas pajak tangguhan dicatat dalam laporan posisi keuangan. Penggunaan beban pajak tangguhan dapat memberikan wawasan terhadap praktik manajemen laba yang bertujuan untuk menghindari penurunan laba, mencegah kerugian, dan mengelak dari ketidakpenuhan target laba yang diharapkan oleh para analis (Kusumawati, 2020).

Ukuran perusahaan mempunyai hubungan besar dengan manajemen laba, perusahaan yang besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. perusahaan dengan ukuran besar sensitif dengan biaya politik yaitu pajak sehingga mereka cenderung mengurangi laba bersih laporan keuangannya. Pengurangan laba bersih ini dapat dilakukan dengan mudah karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi pajak yaitu dengan cara perencanaan pajak. dengan adanya penurunan tarif, maka perusahaan yang berukuran besar cenderung mengurangi labanya pada saat sebelum terjadinya penurunan pajak (Wjiaya dan Martani, 2011).

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan mengkategorikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan pada praktik manajemen laba, karena perusahaan yang lebih besar diharapkan untuk memenuhi harapan dari para investor atau pemegang sahamnya. Selain itu, ukuran perusahaan juga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan besar cenderung memerlukan jumlah dana yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan dapat melakukan penerbitan saham baru atau menambah pinjaman (Yuliana & Prastyatini, 2022).

Ukuran perusahaan merujuk pada sejauh mana aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, apakah itu tinggi atau rendah. Memiliki aset yang besar akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini dapat menghasilkan laba yang signifikan dari hasil penjualan perusahaan. Ketika dalam situasi ini, perusahaan dapat berupaya mengurangi beban pajak dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak yang sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku saat ini. Perusahaan melaksanakan tindakan ini dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin timbul, dan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan benar atau tidak, hal ini akan mempengaruhi persepsi para pemilik modal perusahaan terkait kelangsungan operasional perusahaan (Setyawan, 2020).

Tabel 1.1
Research Gap

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil dari penelitian perencanaan pajak terhadap manajemen laba.	Lestari, Kurnia, dan Yunianti (2018)	Menemukan hasil yang berbeda, Dimana perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

	Wardani dan Santi (2018)	Meneliti bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Terdapat perbedaan hasil dari penelitian dari beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Subagyo, Oktavia, dan Mariana (2011)	Menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
	Ulfah (2013)	Menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
Terdapat perbedaan hasil dari penelitian dari ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Wibisana & Ratnaningsih (2014) dan Lubis dan Suryani (2018)	Menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.
	Sosiawan (2012) dan Agustia & Suryani (2018)	Menyatakan bahwa ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Sumber : dari berbagai refrensi

Berdasarkan dari hasil pertimbangan fenomena dan berbagai pemikiran yang telah dijelaskan diatas. Karena masih rentan nya bagi Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan praktek manajemen laba agar kinerja Perusahaannya terlihat baik dimata investor sehingga mempengaruhi kinerja manajemen laba terhadap laporan keuangan sebuah Perusahaan yang telah disajikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau tidak sesuai dengan keadaan Perusahaan yang sebenarnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas factor yang mempengaruhi manajemen laba pada Perusahaan sektor perindustrian di Indonesia dengan judul **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perindustrian Yang Terdartar di Bursa EfekIndonesia Tahun 2018- 2022)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba?
5. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba?
6. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh antara ukuran Perusahaan terhadap manajemen laba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran Perusahaan terhadap manajemen laba.
4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh komisaris independen memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba
5. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh komisaris independen memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
6. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh komisaris independen memoderasi hubungan antara ukuran Perusahaan terhadap manajemen laba.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan, maupun informasi terhadap perkembangan ilmu akuntansi perpajakan serta dapat menjadi ref. Khususnya yang berkaitan dengan factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga di mana penulis dapat menambah dan memperoleh gambaran nyata dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan, terutama di bidang akuntansi perpajakan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi atau pemberian pinjaman pada perusahaan.

c. Bagi Pihak Lain

Hal penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta bahan perbandingan yang akan dapat menambah pengetahuan

